

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembinaan kenakalan remaja di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah dijalankan secara komprehensif dan terintegrasi melalui tiga dimensi peran sektor publik sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones, yaitu pengorganisasian (*organization*), penafsiran (*interpretation*), dan penerapan (*application*). Ketiga dimensi ini berjalan secara sinergis dan saling mendukung, sehingga mampu menjawab rumusan masalah tentang bagaimana implementasi kebijakan Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja di Kota Surabaya.

Dalam dimensi pengorganisasian, Satpol PP telah membangun fondasi kebijakan yang kuat melalui perumusan program yang sistematis berbasis data operasional dan laporan masyarakat, didukung oleh landasan hukum yang komprehensif mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas antar bidang fungsional, penetapan prioritas sasaran berdasarkan tiga dimensi (geografis, usia, dan jenis kenakalan), serta pengembangan inovasi seperti program Duta Trantibum dan Satpol PP Goes

To School menunjukkan kapasitas kelembagaan yang matang dalam merencanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada dimensi penafsiran, Satpol PP telah menerjemahkan kebijakan publik ke dalam program-program operasional yang konkret dan adaptif. Pendekatan yang mengedepankan aspek persuasif dan rehabilitatif, sebagaimana tercermin dalam program pembinaan intensif di Rumah Perubahan dan Rumah Aman selama 7 hingga 14 hari, menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar penindakan represif menuju pembinaan yang humanis dan berkelanjutan. Kemampuan institusi dalam menafsirkan peraturan daerah ke dalam tindakan nyata, termasuk penyediaan fasilitas alternatif bagi remaja untuk menyalurkan bakat secara positif, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Dalam dimensi penerapan, Satpol PP telah merealisasikan berbagai program secara konsisten dan terukur. Patroli Asuhan Rembulan yang dilaksanakan rutin setiap malam, sosialisasi ke sekolah-sekolah, prosedur penanganan remaja yang terstruktur mulai dari penjangkauan hingga pembinaan lanjutan, serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan aplikasi Sapu Jagat menunjukkan komitmen institusi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan. Peran aktif masyarakat melalui Command Center 112 dan keterlibatan lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3APPKB, dan kepolisian semakin memperkuat efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

Keberhasilan kebijakan ini tercermin dari penurunan signifikan kasus kenakalan remaja dari lebih dari 450 kasus menjadi di bawah 100 kasus, atau

menurun sekitar 80 persen dalam kurun waktu satu tahun. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi ketiga dimensi implementasi kebijakan yang saling menguatkan: pengorganisasian yang matang menyediakan struktur dan sumber daya, penafsiran yang tepat memberikan pemahaman dan arahan yang jelas, serta penerapan yang konsisten mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah personel dan anggaran, dinamika perilaku remaja yang terus berubah, serta kurangnya dukungan dari sebagian orang tua, komitmen Satpol PP untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan menunjukkan arah yang positif bagi upaya penciptaan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang berkelanjutan di Kota Surabaya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan:

Rekomendasi utama ditujukan kepada Satpol PP Kota Surabaya, terutama terkait pengembangan sumber daya manusia. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan persuasif dan rehabilitatif sangat bergantung pada kualitas personel di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan yang mencakup psikologi remaja, teknik komunikasi persuasif, konseling dasar, serta deteksi dini perilaku menyimpang. Selain aspek kualitas, aspek kuantitas juga menjadi perhatian serius mengingat rata-rata hanya 12 personel per kecamatan dari

total 1.477 personel yang ada. Pemerintah kota disarankan mengoptimalkan distribusi personel dan memperkuat peran Linmas di tingkat kelurahan.

Dari sisi anggaran dan fasilitas, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembalikan alokasi anggaran ke tingkat yang memadai serta memperluas kapasitas Rumah Perubahan dan Rumah Aman sebagai pusat pembinaan intensif. Penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi rekomendasi penting melalui pembentukan forum tetap dan mekanisme pertukaran data real-time dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3APPKB, dan kepolisian. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan terpadu, CCTV, dan sistem database terintegrasi perlu dioptimalkan untuk mendukung pengawasan dan evaluasi program yang lebih akurat.

Pemerintah kota juga didorong mengembangkan program pemberdayaan remaja melalui perluasan fasilitas balap legal, pusat kegiatan remaja di setiap kecamatan, serta program seni dan kewirausahaan. Penguatan peran keluarga dan masyarakat menjadi fondasi penting melalui program sekolah orang tua, konseling keluarga, dan pemberdayaan RT/RW serta karang taruna dalam pengawasan lingkungan. Kebijakan jam malam yang telah terbukti efektif menurunkan kasus hingga 80 persen perlu terus diintegrasikan dengan program pembinaan yang komprehensif.

Masyarakat diharapkan lebih proaktif melaporkan potensi kenakalan melalui Command Center 112 dan terlibat dalam kegiatan positif di lingkungannya. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak, terutama terkait

aktivitas di luar rumah dan penggunaan media sosial. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan studi tentang efektivitas jangka panjang program pembinaan, penelitian komparatif antar daerah, serta kajian mendalam tentang faktor-faktor keberhasilan program Rumah Perubahan dan Rumah Aman sebagai model pembinaan yang humanis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi saran dan rekomendasi ini perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pembinaan kenakalan remaja di Kota Surabaya.